BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakanan oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kenerja, serta sebagaimana program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran Perangkat daerah, RKPD Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan mempunyai arti yang Srategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan/sub kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

3. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat disusun dengan tahapan :

a. Persiapan Penyusunan.
b. Penyusunan rancangan awal .
c. Penysunan rancangan.
d. Perumusan rancangan akhir.
e. Penetapan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Evaluasi RKPD triwulan 2 Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 30 Juni 2025. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025, kondisi Triwulan 2 ini dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBD tahun anggaran 2022
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten NunukanTahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 14);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2025, guna :

a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.
b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2025.
d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2024.

e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2020, yang merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.

f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4. Metodeologi

Metodeologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel: 1.1
Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91% ≥ 100%
2	Tinggi	T	76% ≤ 90 %
3	Sedang	S	66% ≤ 75%
4	Rendah	R	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50%

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 kondisi Triwulan 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

1.1 Latar Belakang.

1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.4 Metodeologi .

1.5 Sistematika Penulisan.

BAB II : Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program dan kegiatan/ Sub Kegiatan.

2.1 Capaian Target Kinerja.

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025.

BAB III : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025,

3.1 Hambatan/ Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan.

BAB IV : Penutup.

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN

2.1. Anggaran Belanja

Pada tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan mendapat belanja sejumlah Rp. **26.887.198.143,-** Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Uraian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1	2	3
1.	**Belanja Operasi**	**25.143.193.373,-**
	- Belanja Pegawai	14.450.353.355,-
	- Belanja Barang dan Jasa	10.692.840.018,-
2.	**Belanja Modal**	**1.744.004.770,-**
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	887.504.770,-
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	856.500.000,-
Total Anggaran		**26.887.198.143,-**

2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan.

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efesiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeur.

Adapun ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan kondisi sampai dengan 30 Juni 2025 Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel :2.1

Pencapaian Target Kinerja Keuangan Triwulan 2
Tahun Anggaran 2025

No	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran						
		Anggaran		Realisasi		Sisa Anggaran		%
1	2	3		4		5		6
I	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.**	**Rp**	**1.267.353.940,00**	**Rp**	**63.638.000,00**	**Rp**	**1.203.715.940,00**	**5,02%**
1	***Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota***	**Rp**	**418.291.860,00**	**Rp**	**8.460.000,00**	**Rp**	**409.831.860,00**	**2,02%**
1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	17.647.610,00	Rp	-	**Rp**	**17.647.610,00**	0,00%
1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp	381.049.450,00	Rp	8.460.000,00	**Rp**	**372.589.450,00**	2,22%
1.3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Rp	-			**Rp**	**-**	0,00%
1.4	Pengelolaan Sistem komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Rp	19.594.800,00			**Rp**	**19.594.800,00**	**0,00%**
2	***Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran***	**Rp**	**21.563.740,00**	**Rp**	**4.590.000,00**	**Rp**	**16.973.740,00**	**21,29%**

2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp	18.194.300,00	Rp	4.590.000,00	**Rp**	**13.604.300,00**	25,23%
2.2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp	3.369.440,00			**Rp**	**3.369.440,00**	0%
3	**Insvestigasi Kejadian Kebakaran**	**Rp**	**28.286.010,00**	**Rp**	**6.060.000,00**	**Rp**	**22.226.010,00**	**21,42%**
3.1	Insvestigasi Kejadian Kebakaran,Meliputi Penilaian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Rp	28.286.010,00	Rp	6.060.000,00	**Rp**	**22.226.010,00**	21,42%
4	***Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran***	**Rp**	**170.114.520,00**	**Rp**	**6.060.000,00**	**Rp**	**164.054.520,00**	**3,56%**
4.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp	27.768.770,00			**Rp**	**27.768.770,00**	**0,00%**
4.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp	66.622.750,00			**Rp**	**66.622.750,00**	0,00%
4.3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Rp	75.723.000,00	Rp	6.060.000,00	**Rp**	**69.663.000,00**	**8,00%**
5	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Rp**	**629.097.810,00**	**Rp**	**38.468.000,00**	**Rp**	**590.629.810,00**	**6,11%**
5.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpah, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Rp	52.078.750,00		14.600.000,00	**Rp**	**37.478.750,00**	28,03%
5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Rp	557.417.000,00		23.868.000,00	**Rp**	**533.549.000,00**	4,28%
5.3	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	Rp	19.602.060,00					0,00%

II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Rp**	**25.619.844.203,00**	**Rp**	**11.466.064.402,30**	**Rp**	**14.153.779.800,70**	**44,75%**
1	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Rp**	**27.232.485,00**	**Rp**	**4.372.000,00**	**Rp**	**22.860.485,00**	**16,05%**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	2.129.380,00			**Rp**	**2.129.380,00**	0,00%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	12.553.105,00	Rp	4.372.000,00	**Rp**	**8.181.105,00**	34,83%
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	12.550.000,00			**Rp**	**12.550.000,00**	0,00%
2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Rp**	**14.450.353.355,00**	**Rp**	**7.231.882.863,00**	**Rp**	**7.218.470.492,00**	**50,05%**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	14.450.353.355,00		7.231.882.863,00	**Rp**	**7.218.470.492,00**	50,05%
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Rp**	**24.400.000,00**			**Rp**	**24.400.000,00**	**0,00%**
3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	24.400.000,00			**Rp**	**24.400.000,00**	0,00%
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp**	**61.934.000,00**			**Rp**	**61.934.000,00**	**0,00%**
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	61.934.000,00			**Rp**	**61.934.000,00**	0,00%
5	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Rp**	**181.506.065,00**	**Rp**	**22.225.278,00**	**Rp**	**159.280.787,00**	**12,24%**
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp	6.080.800,00			**Rp**	**6.080.800,00**	0,00%
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	1.745.000,00			**Rp**	**1.745.000,00**	0,00%
5.3	Penydiaan Bahan Logistik Kantor	Rp	64.192.660,00			**Rp**	**64.192.660,00**	0,00%
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	24.613.605,00			**Rp**	**24.613.605,00**	**0,00%**
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	84.874.000,00	Rp	22.225.278,00	**Rp**	**62.648.722,00**	26,19%

6	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Rp**	**14.700.000,00**			**Rp**	**14.700.000,00**	**0,00%**
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	14.700.000,00			**Rp**	**14.700.000,00**	0,00%
7	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Rp**	**9.129.005.464,00**	**Rp**	**3.987.849.061,30**	**Rp**	**5.141.156.402,70**	**43,68%**
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	232.798.000,00		69.198.304,30	**Rp**	**163.599.695,70**	29,72%
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	8.896.207.464,00		3.918.650.757,00	**Rp**	**4.977.556.707,00**	**44,05%**
8	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Rp**	**1.730.712.834,00**	**Rp**	**219.735.200,00**	**Rp**	**1.510.977.634,00**	**12,70%**
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Rp	9.000.000,00			**Rp**	**9.000.000,00**	0,00%
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Rp	806.287.944,00		210.075.200,00	**Rp**	**596.212.744,00**	**26,05%**
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	9.600.000,00			**Rp**	**9.600.000,00**	0,00%
8.4	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	248.002.070,00	Rp	-	**Rp**	**248.002.070,00**	0,00%
8.5	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	557.822.820,00	Rp	9.660.000,00	**Rp**	**548.162.820,00**	1,73%
8.6	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	100.000.000,00			**Rp**	**100.000.000,00**	0,00%
	Total Anggaran	**Rp**	**26.887.198.143,00**	**Rp**	**11.529.702.402,30**	**Rp**	**15.357.495.740,70**	**42,88%**

Dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan pada Tahun 2025 melaksanakan 2 Program dan 13 Kegiatan serta 33 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebelum sebesar **Rp. 26.887.198.143,00** ,-. dengan realisasi keuangan sampai 30 Juni 2025 sebesar **Rp 11.529.702.402,30**,- atau sebesar **42,88%**

BAB III

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

3.1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan program kegiatan dan Sub Kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra SKPD, serta mengetahui hambatan dan,permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) tehadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan telah melaksanakan program kegiatan dan Sub Kegiatannya. Realisasi keuangan sampai dengan 30 Juni 2025 (Triwulan II) ini sebesar Rp. **11.529.702.402,30**,- dengan persentase capaian sebesar **42,88 %.** Sesuai dengan daftar terlampir :

3.2. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki hambatan dan kendala-kendala, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

a. Pagu Anggaran Tidak Sesuai dengan yang direncanakan.
b. Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah yang berdampak pada belum terpenuhinya Anggaran kegiatan dan sub kegiatan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menyebabkan terlambatnya penyerapan anggran dan capaian kinerja.
c. Penerbitan SPD tidak berdasarkan Anggran Kas yang terdapat dalam RKA/DPA Perangkat Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini sebagai acuan untuk mengetahui sejauhmana program kegiatan telah dilaksanakan dan juga merupakan landasan penilaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan . Oleh sebab itu betapapun sederhananya hasil evaluasi ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan ettos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan tugas pelayanan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Demikian Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil–hasil yang dicapai maupun kegagalan–kegagalan yang dihadapi akan menjadi gambaran bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Nunukan, Juli 2025
Kepala Dinas,

Drs.RACHMAJI SUKIRNO,M.Si
NIP. 19650819 198608 1 001